



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEMALANG

RENCANA KERJA 2021

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



**Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Pemalang**

Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No.34 Pemalang – 52313

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT dengan selesainya penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2021.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah, disamping memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025, Standar Pelayanan Minimal serta Rencana Awal Strategis Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang 2016-2021.

Renja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk memberikan gambaran arah kebijakan, tujuan, sasaran dan program kerja serta kegiatan organisasi yang akan dicapai dalam periode penganggaran satu tahun.

Kami menyadari bahwa dengan segala keterbatasan yang ada, Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2021 ini masih dijumpai beberapa kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang membangun diperlukan guna penyempurnaan perencanaan di masa yang akan datang.

Pemalang, 2020

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PEMALANG**



Ir. MUGIYATNO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640528 198903 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN
PEMALANG

PERATURAN KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR: 050.4 /1.106/ PERKIM/2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANKABUPATEN
PEMALANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai kewajiban menyusun Rencana Kerja ;
 - b. bahwa Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang sebagai Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan dengan berpedoman kepada RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2021.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2021.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang -Undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah(lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014. Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 15. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
 16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembabaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2005-2025 (Lembaga Daerah Kabupaten Pemalang Tahun n2009 nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Pemalang (Lembaga Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2013 Nomor 9

25. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 61 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas , Fungsi dan Tata
Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Pemalang;

26. Peraturan Bupati Pemalang Nomor: tahun 2021 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN PEMALANG TENTANG RENCANA
KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021.**

Pasal 1

Rencana Kerja PD (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Pemalang Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pada
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang memuat tujuan, sasaran,
program dan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan dengan
berpedoman pada RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2021.

Pasal 2

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Pemalang Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Lalu dan capaian Renstra
- 2.2. Analisis kinerja Pelayanan DISPERKIM
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang Jaya.
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Bab IV : PENUTUP.

Pasal 3

Isi, uraian dan perincian Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang Jaya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pematang Jaya, 2020

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PEMALANG

Ir. MUGIYATNO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640528 198903 1 008

DAFTAR ISI

BAB I	
PENDAHULUAN.....	11
1.1. Latar Belakang.....	11
1.2. Landasan Hukum.....	14
1.3. Maksud dan Tujuan.....	18
1.4. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN LALU.....	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Pemalang Tahun Lalu dan Capaian Renstra.....	22
2.1.1. Urusan Wajib Perumahan	23
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	26
2.2.1. Urusan Perumahan.....	26
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang.....	46
2.3.1. Urusan Perumahan.....	48
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	52
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	60
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang.....	62
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD.....	
BAB V PENUTUP.....	
II-10	73

Lampiran : Peraturan Kepala Dinas
Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Pematang
Nomor : 050 / / PERKIM/2020
Tanggal : 2020

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja Perangkat Daerah , yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pematang tahun 2021 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang

tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah .

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang sebagai Perangkat Daerah pada tahun 2021. ini menyusun Rencana KerjaDinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2021.

RenjaPerangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat daerah , sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Perubahan Rencana KerjaDinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang tahun 2021, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi misi Pemalang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Visi : **“TERWUJUDNYA PEMALANG HEBAT YANG BERDAULAT, BERJATIDIRI, MANDIRI DAN SEJAHTERA”**

Misi :

1. Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat, dan gotong royong.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak.
3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.

4. Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah.
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, dan saling menghormati.
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah.
7. Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang, maka misi yang terkait adalah:

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang tahun 2021, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2021.

Penyusunan program dan kegiatan tersebut dilakukan dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah sebagaimana dinyatakan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2021, pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 dan target Pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah RKPD Tahun 2021. Langkah tersebut dicapai sebagai pengejawantahan dari sinkronisasi dan harmonisasi rencana pembangunan nasional provinsi dan kabupaten.

1.2.Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah(lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014. Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1950 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4833);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2018;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klarifikasi , Kodefikasi, dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2020 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);

28. Peraturan Bupati Pematang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pematang Tahun 2011-2030;
29. Peraturan Bupati Pematang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang;
30. Peraturan Bupati Pematang Nomor tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2021

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang Tahun 2021 adalah agar dapat menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan dasar pada tahun ini, yang merupakan salah satu sektor pendukung terwujudnya visi dan misi Bupati Pematang. Secara rinci maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Pematang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menjadi panduan bagi organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya sesuai dengan pelimpahan urusan kepada dinas.
2. Menjadi pedoman untuk mengukur kinerja aparatur berdasarkan uraian tugas yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi Pemerintah Daerah.

Tujuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten Pematang adalah sebagai berikut :

1. Mengendalikan proses pembangunan sektor Perumahan dan kawasan permukiman dalam satu tahun kedepan.
2. Terwujudnya perencanaan, pelaksanaan program dan kebijakan pada Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan dasar dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan secara utuh dan menyeluruh.
3. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman yang berkualitas melalui pembangunan RTLH, Kawasan kumuh, RTH Publik dan meningkatnya Rumah layak huni.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik antara lain memuat sebagaimana berikut:

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN LALU

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, selain itu memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen Renja tahun berjalan sebagai bahan acuan. Bab ini memuat hal-hal sebagaimana berikut:

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun Lalu dan Capaian Renstra

2.1.1. Urusan Wajib Perumahan

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

2.2.1. Urusan Wajib Perumahan

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang

2.3.1. Urusan Wajib Perumahan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini berisikan tujuan dan sasaran renja serta program dan kegiatan tahun 2021 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja TahunLalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang Jaya adalah dokumen perencanaan tahunan yang antara lain memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju. Tercapai atau tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Evaluasi hasil terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2021, berdasarkan realisasi target kinerja keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan, serta capaian dari target program/ kegiatan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang Jaya.

Dari hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2019, disimpulkan bahwa belum semuanya dapat dilaksanakan secara optimal, disebabkan adanya perubahan kondisi yang terjadi dilapangan dari kondisi yang direncanakan semula serta kendala-kendala teknis lainnya yang belum mampu dituntaskan selama 1 (satu) tahun anggaran berjalan.

Dari beberapa kegiatan yang sudah dicapai tersebut, masih terdapat perbedaan dengan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat, hal ini terlihat pada indikator kinerja yang digunakan pada pencapaian sasaran ada yang sampai tingkat output dan adapula

yang sampai pada tingkat outcome. Penyebabnya adalah bidang belum dapat secara tegas mendefinisikan indikator kinerja out come untuk seluruh sasaran yang ada sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat, hal ini disebabkan karena penyusunan basis data yang masih kurang dari masing-masing bidang. Dalam tahun mendatang tentunya akan merumuskan lagi indikator keberhasilan yang menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat adalah sebagaimana tersebut dalam table-tabel berikut.

2.1.1. Urusan Wajib Perumahan

Pemukiman kumuh adalah pemukiman yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis. Bangunan-bangunannya berkondisi substandar atau tidak layak, dihuni oleh penduduk miskin yang padat. Kawasan yang sesungguhnya tidak diperuntukkan sebagai daerah pemukiman, oleh penduduk miskin yang berpenghasilan rendah dan tidak tetap diakupasi untuk dijadikan tempat tinggal. Perkembangan capaian lingkungan pemukiman kumuh di Kabupaten Pematang Jaya dalam kurun waktu 2018-2019 seperti terlihat pada tabel berikut.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan pada urusan wajib perumahan dinilai dengan lima indikator ,yaitu rumah tangga pengguna air bersih, rumah tangga pengguna listrik, rumah tangga bersanitasi, lingkungan permukiman kumuh dan rumah layak huni. Perkembangan capaian indikator pada urusan wajib perumahan selama kurun waktu 2018-2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.12. Realisasi Indikator Kinerja Daerah
Aspek Pelayanan Umum Fokus Layanan Urusan Wajib Perumahan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018		Tahun 2019			Target Akhir Renstra	% Capaian s/d 2019 terhadap Target Akhir 2021
			2018	2018	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7) / (6)	(9)	(10) = (7) / (9)
1.	Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai AKIP	50	50	55		100	61	86.9-
2	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Sarana Prasaranya	Persentase RTLH	11,5	11,18	12,36	17,17	83.26	15	54.06
		Persentase Rumah Layak Huni	95	95	96	96	100	96	97.9
3	Meningkatnya Kualitas Kawasan permukiman	Persentase Luasan RTH Publik	6	6	8	8	100	14	28.57
		Persentase Kawasan Kumuh	2	2	1	1,4	100	0.1	3.33

a. Lingkungan Permukiman Kumuh

Seiring dengan pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan, maka kebutuhan penyediaan akan prasarana dan sarana permukiman akan meningkat pula, baik melalui peningkatan maupun baru. Selanjutnya pemenuhan akan kebutuhan prasarana dan sarana permukiman baik dari segi perumahan maupun lingkungan permukiman yang terjangkau dan layak huni belum sepenuhnya dapat disediakan baik oleh masyarakat sendiri maupun pemerintah, sehingga kapasitas daya dukung prasarana dan sarana lingkungan permukiman

Yang adamulai menurun yang pada gilirannya memberikan konstribusi terjadiny alingkungan permukiman kumuh.Perkembangan capaian lingkungan pemukiman kumuh selama periode 2019-2020.

b. Rumah Layak Huni

Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik .maka harus dipenuhi isyarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga.Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni,diharapkan tercapai ketahanan keluarga.Capaian rumah layak huni diKabupaten Pematang terus menunjukkan tren yang positif.Di Tahun 2019 capaiannya sebesar96%, meningkat1% dibanding tahun sebelumnya.

c. Persentase RTLH

RTLH merupakan program bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, dimana pemerintah memberikan rangsangan bantuan bagi masyarakat tidak mampu atau Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)di tahun 2019 capaiannya 17.17% capaian indikator ini menunjukkan kecenderungan positif, dimana bisa menambah rumah kategori layak huni bagi masyarakat.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perumahan dan Kawasan Permukiman

2.2.1. Urusan Perumahan Perumahan

Kinerja penyelenggaraan urusan wajib perumahan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5(lima) target indikator dalam Renja Tahun 2020 dan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021, seperti tertuang dalam tabel hasil pengukuran kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupate Pemalang di atas, secara rinci capaian masing-masing sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. **Sasaran Strategis 1** :Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun		Tahun 2019			Target Akhir Renstra	% Capaian s/d 2018 terhadap Target Akhir 2021
			2018	2018	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7) / (6)	(9)	(10) = (7) / (9)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah	Nilai SAKIP	50	50	55		-	61	61

Dokumen Renja merupakan laporan tahunan yang berisi rencana kerja suatu instansi dalam merencanakan tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan ini berisi ikhtisar rencana sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan/perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah demi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Renja .

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai salah satu instansi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya memiliki peranan/kontribusi dalam pencapaian target kerja yang telah ditentukan.

2. **Sasaran Strategis 2:** Meningkatnya kualitas kawasan permukiman

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun		Tahun 2019			Target Akhir Renstra	% Capaian s/d 2018 terhadap Target Akhir 2021
			2018	2018	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7) / (6)	(9)	(10) = (7) / (9)
2	Meningkatnya Kawasan Perumahan dan Sarana prasarananya	Persentase RTLH	11.5	11.18	12.36	17.17	83.26	15	54.06
		Persentase Rumah Layak Huni	95	95	96	96	100	96	97.9
3	Meningkatnya kualitas Kawasan permukiman	Persentase Luasan RTH Publik	6	6	8	8	100	14	28.57
		Persentase Kawasan Kumuh	2	2	1	1,4	100	0.1	3.33

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan perumahan diatas, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2019 dengan target akhir RPJMD, terlihat bahwa dari sebanyak 5(lima)target indikator RPJMD Tahun 2016-2021,4(empat) indikator berstatus akan tercapai, dan1 (satu) indikator berstatus sulit tercapai, yaitu Rumah Tidak Layak huni .

Dibandingkan target capaian indikator Renja Tahun

2020, maka sebanyak 3(tiga) indikator belum memenuhi target capaian,antara lain:

- a. Nilai sakip .
- b. Rumah layak huni karena terkendala adanya persyaratan calon penerima bantuan yang harus terdaftar diKementerian Hukum dan HAM.
- c. Rumah Tidak Layak huni

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2020 berikut kami sajikan hasil Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Pemerintah daerah dan Pencapaian Renja PD s/d tahun 2020 Triwulan I sampai triwulan IVDinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang Seperti dalam Lampiran tabel 2.2.2. berikut:

Formulir Evaluasi Hasil Renja PD
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang
Periode Pelaksanaan Triwulan IV Tahun 2019

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2016 s/d 2021 Periode Renstra PD		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun 2016		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2019) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)		SKPD Pengampu		
										I		II		III		IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		14=13/7*100		15=14/5x100				
				K	RENS TRA	K	Rp (juta)	K	REN JA	APBD	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	Rp		K%	Rp	K%	Rp		
1	1.04.1.04.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	100 %	47234000	100	885,94	12	13293000	16.199.200	3	2.541.273	3	6580213,15																PERKIM
	1.04.1.04.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim 1000 (12 bulan)	100 %	110.000	100	38,85	12	15000	8.100	3	900	3	1.490	3	0		4790	12	7180	100	88,64								

1.04.1.04.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik serta LPJU 6 jenis kebutuhan (12 bulan)	100 %	38.200.000	100	93,51	12	12600	15.251.100,0	3	2.493.351,90	3	6.215.300	3	1.255.282,00	3	5019823,01	12	14983757	100	98,25
1.04.1.04.01.01.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara 34 KALJ unit (12 bulan)	100 %	750000	100	31,31	12	20000	30000	3	728,35	3	7259,6	3	1021,1	3	8829,7	12	17838,7	100	59,46
1.04.1.04.01.01.01	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah penyedia Jasa Administrasi Keuangan 10 Orang laporan (12 bulan)	100 %	375000	100	80,84	12	100000	150000	3	10000	3	60110,0	3	13250	3	62500	12	145860	100	97,24
1.04.1.04.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah gedung yang terpelihara kebersihannya 1 paket (12 bulan)	100 %	340000	100	32,92	12	60000	90000	3	6627,9	3	37113,5	3	9649,6	3	33575,5	12	86966,5	100	96,63
1.04.1.04.01.01.10	Penyediaan alat tulis Kantor	Persediaan alat tulis kantor yang tersedia 1 paket (12 bulan)	100 %	229000	100	75,19	12	50000	60000	3	3893	3	27864,0	3	6618	3	21602,2	12	59977,2	100	99,96
1.04.1.04.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang di gandakan 200000 lembar dan jumlah dokumen yang di cetak 1 paket (12 bulan)	100 %	430000	100	76,61	12	50000	60000	3	6669,6	3	25515,6	3	4825,8	3	22935,8	12	59946,8	100	99,91

1.04.1.04.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen instalasi listrik penerangan bangunan gedung kantor (12 bulan)	100 %	90000	100	59,70	12	25000	20000	3	0	3	7730	3	2164	10086,5	12	19980,5	100	99,90						
1.04.1.04.01.01.14	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan perlengkapan kantor yang tersedia 8 unit (12 bulan)	100 %	130000	100	93,89	12	60000	50000	3	0	3	48675,0	3	0	300	12	48975	100	97,95						
1.04.1.04.01.01.15	Penyediaan peralatan rumah tangga	tersedianya peralatan rumah tangga (12 bulan)	100 %	400000	100	46,39	12	18000	35000	3	2499	3	10356,0	3	2705	14859,3	12	30419,3	100	86,91						
1.04.1.04.01.01.17	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang tersedia 1 paket (12 bulan)	100 %	5000000	100	88,26	12	15000	20000	3	1390	3	6950,0	3	0	9173	12	17513	100	87,57						
1.04.1.04.01.01.18	penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman 4575, 750 ,300 dus (12 bulan)	100 %	300000	100	74,11	12	50000	70000	3	5305	3	26866,5	3	4714,5	32378,8	12	69264,8	100	98,95						
1.04.1.04.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 181, 150, 137 oh (12 bulan)	100 %	450000	100	94,36	12	150000	325000	3	7908,6	3	94682,9	3	40039,5	169534,2	12	312165,2	100	96,05						
1.04.1.04.01.01.19	Penyediaan jasa keamanan	Jumlah Penyediaan jasa keamanan 3 orang	100 %	430000	100	0,00	12	80000	30000	3	2.000	3	10300,0	3	2000	10347	12	24647	100	82,16						

1.04.1.04.01.01.15.01	Penetapan kebijakan , strategi , dan program perumahan	TerlaksananyaPerbup Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman 1 perbup			100	54,61	12	100000	100000	3	0	3	11477,5	11821,5	75538	12	98837	100	98,84						
1.04.1.04.01.01.15.03	Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	Terlaksananya Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan 50 persen (12 bln)			100	46,66	12	50000	100000	3	0	3	25256,2	14174,8	37980,9	12	77411,9	100	77,41						
1.04.1.04.01.01.15.04	Sosialisasi peraturan perundang undangan di bidang perumahan	Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang undangan di bidang perumahan 90 persen 12 bulan	100 %		100	49,14	12	50000	50000	3	0	3	15775,4	4199,6	11778,4	12	31753,4	100	63,51						
1.04.1.04.01.01.15.05	Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan dan usaha	Terlaksananya Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha 11 kegiatan 90 persen (12 bln)	100 %		100	63,52	12	50000	25000	3	1367,5	3	7929,1	2199,4	7415,6	12	18911,6	100	75,65						
1.04.1.04.01.01.15.06	Fasilitas dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Terlaksananya Fasilitas dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 240 rumah			100	92,16	12	2700000	2460000	3	0	3	235288	62950	2013960,5	9	2312198,5	75	93,99						

1.04.1.04.01.01.15.07	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 11 paket (12 bln)	100 %		100	95,84	12	1800000	3200000	3	5400	3	455942,4	3	1070005,6	3	1650137,3	12	3181485,3	100	99,42						
1.04.1.04.01.01.15.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan 5 kegiatan (12 Bln)	100 %		100	44,58	12	50000	50000	3	540	3	15788,4	3	-0,4	3	30429,7	12	46757,7	100	93,52						
1.04.1.04.01.01.15.09	Pembangunan prasarana dan sarana utilitas umum (PSU)	Terlaksananya Pembangunan prasarana dan sarana utilitas umum 10 paket 90 persen (12 bln)	100 %		100	80,35	12	30000	16650000	3	64690	3	502890,7	3	881048,3	3	12935490,1	12	14384119	100	86,39						
1.04.1.04.01.01.15.10	Pemeliharaan prasarana dan sarana utilitas umum	Terlaksananya Pemeliharaan prasarana dan sarana utilitas umum 11 paket (12 Bln)	100 %		100	90,96	12	1600000	2700000	3	25480	3	503242,9	3	182844,1	3	1906760,7	12	2618327,7	100	96,98						
1.04.1.04.01.15.11	Penyusunan database perumahan	Terlaksananya Penyusunan database perumahan 211 desa /kelurahan	100 %		100	0,00	12	100000	50000	3	0	3	26941	3	2100	3	17911,84	9	46952,84	75	93,91						
1.04.1.04.01.15.13	Fasilitasi dan verifikasi proses Sertifikasi Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Terlaksananya Fasilitasi dan verifikasi proses Sertifikasi Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) 100 orang 12 bulan	100 %		100		12	500000	50000	3	0	3	25898,6	3	1440	3	8653,5	9	35992,1	75	71,98						

1.04.1.04.01.15.14	Fasilitasi dan verifikasi pengajuan Rekomendasi Teknis IMB	Terlaksananya Fasilitasi dan verifikasi pengajuan Rekomendasi Teknis IMB 100 orang 2 kali 12 bulan	100 %		100	12	50000	50000		0	3	34637	0	12061	46698	93,40								
1.04.1.04.01.15.17	Perencanaan pembangunan/pemeliharaan Prasarana dan Sarana umum	Terlaksananya Perencanaan/pemeliharaan Prasarana dan Sarana umum rumah tinggal bersanitasi 73% dan 3% kawasan kumuh	100 %		100	12	500000	100000		0	3	2864,8	11189,2	64188,7	78242,7	78,24								
7	1.04.1.04.01.16	Program lingkungan sehat perumahan	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100 %	11600000	100	157,77	1250000	49000	22206	1775													
1.04.1.04.01.01.15.01	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan	Terlaksananya Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan 1 keg	100 %		100	70,77	200000	25000	3		1775	-1288,8	220,8	14402,2	15109,2	60,44								
1.04.1.04.01.01.15.03	Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan	Terlaksananya Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan 1 keg	100 %		100	62,78	50000	25000	3		0	3895	350	19812	24057	96,23								

1.04.1.04.01.01.15.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 kegiatan 12 bulan	100 %		100	24,22	12	50000	25000	3	0	3	711,1	3	74,9	3	20660	12	21446	100	85,78					
1.04.1.04.01.16.07	Rekonstruksi dan rehabilitasi rumah akibat bencana alam	Rekonstruksi dan rehabilitasi rumah akibat bencana alam 5 kegiatan 12 bulan	100 %		100		12	400000	100000	3	0	3	12146,9	3	7059,1	3	67790,5	12	86996,5	100	87,00					
1.04.1.04.01.16.08	Fasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berkemampuan rendah (MBR)	Terlaksananya Fasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berkemampuan rendah (MBR)	100 %		100		12	50000	50000	3		3	2480	3	5850	3	16449,4	12	24779,4	100	49,56					
1.04.1.04.01.16.09	Pembinaan dan bimbingan teknis penyediaan dan pengendalian kawasan permukiman	Terlaksananya Pembinaan dan bimbingan teknis penyediaan dan pengendalian kawasan permukiman	100 %		100		12	100000	100000	3		3	900	3	1946	3	96453	12	99299	100	99,30					
1.04.1.04.01.16.11	Fasilitasi penyediaan dan pengembangan kawasan siap bangun (KASIBA)	Terlaksananya Fasilitasi penyediaan dan pengembangan kawasan siap bangun (KASIBA)	100 %		100		12	50000	10000			3	0	3	0			9	0		0,00					

	1.04.1.04.01.16.12	Pencegahan dan penanggungan rumah kumuh dan permukiman kumuh	Terlaksananya Pencegahan dan penanggungan rumah kumuh dan permukiman kumuh	100 %		100	12	200000	40000	3	0	3	1720	450	36123	12	38293	100	95,73									
8	2.04.1.04.01.15	Program penyelesaian konflik pertanahan	persentase terlaksananya penyelesaian konflik pertanahan	100	2100000	100	149,33	500000	700000	12	22206,4																	
	1.04.1.04.01.01.15.01	Fasilitas penyelesaian permasalahan di bidang pertanahan	Terlaksananya Fasilitas penyelesaian permasalahan di bidang pertanahan 1 kep kementerian 12 Bln	100 %	200.000	100	58,14	250000	500000	3	12049,2	3	31044	29099,8	224632,1	12	296825,1	100	59,37									
	2.04.1.04.01.15.02	Rapat koordinasi di bidang pertanahan	Terlaksananya Rapat koordinasi di bidang pertanahan 1 kegiatan 12 bulan	100 %	500.000	100	91,19	100000	500000	3	10157,2	3	86953	49,8	333102,8	3	430262,8	25	86,05									
	2.04.1.04.01.15.03	Fasilitasi pengadaan tanah	Terlaksananya Fasilitasi pengadaan tanah 1 kegiatan 12 bulan	100 %			91,19	50000	5050000	3	0	3	49180,4	3967,6	53534,6	12	106682,6	100	2,11									
	2.04.1.04.01.15.04	Penyusunan database pertanahan	Terlaksananya Penyusunan database pertanahan 1 paket 12 bulan	100 %			91,19	100000	75000	3	0	3	14512	0	48006,56	12	62518,56	100	83,36									

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD Kabupaten/kota berikutnya :

Diisi oleh Kepala BAPPEDA

Disusun

Pemalang ,
Maret 2020

Dievalu
asi
Pemalan
g
Januari
2020

Dari segi pelayanan terhadap masyarakat maupun terhadap pihak-pihak lainnya yang terkait urusan kedinasan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah berusaha sebaik mungkin, namun begitu ada beberapa kendala yang harus segera diatasi untuk meningkatkan pelayanan yang prima, antara lain:

1. Data-data yang tersedia berhubungan dengan infrastruktur yang tersedia kadang tidak lengkap sehingga dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan. Untuk itu diperlukan pendataan ulang terhadap data-data maupun informasi penting yang berhubungan dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui kegiatan-kegiatan Konsultasi seperti Perencanaan maupun Studi Kelayakan;
2. Masih kurangnya pemahaman stakeholder terhadap peraturan perundang-undangan yang baru yang berhubungan dengan tugas dan fungsi pokok dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Seringnya terjadi kendala teknis maupun non teknis selama tahun anggaran berlangsung, sehingga sedikit menunda pelaksanaan pekerjaan yang bahkan ada yang tidak dapat diselesaikan; Selanjutnya untuk lebih jelas melihat Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang berdasarkan Indikator dalam Standar Pelayanan Minimum kami sajikan dalam tabel pada Renstra Pemerintah daerah Kabupaten Pemalang seperti dalam tabel 2.2.3 sebagai berikut :

TABEL 2.2.3 PENCAPAIAN KINERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Indikator	SPM* nasional 2020	IKK (PP No.6/2008)	Target Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2019	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Nilai Sakip		Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan pemerintahan	40	45	50	52	55	61	50	46	52	52	
2	Persentase Rumah Layak huni		Persentase Rumah Layak huni	93	94	95	96	97	98	95	95	96	96	
3	Persentase luasan RTH Publik		Persentase luasan RTH Publik	2	4	6	8	12	14	6	6	8	8	

TABEL 2.2.3 PENCAPAIAN KINERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Indikator	SPM* nasional 2020	IKK (PP No.6/2008)	Target Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Anallisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2019	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4	Persentase RTLH	-	Persentase RTLH tertangani	4.17	9,74	11.05	12.36	13.67	15	11,18	17,17	13.67	22	
5	Persentase kawasan kumuh	10%	Persentase kawasan kumuh	4,7	3	2	1	0.5	0.1	2	2	1	1	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang Jaya.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang, oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Berdasarkan hasil analisis data dan permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing urusan pembangunan daerah, dapat dirumuskan isu strategis Pembangunan daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2021 yang perlu diprioritaskan dalam pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pematang Jaya adalah sebagai berikut:

Dari identifikasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Pemalang, serta dengan memperhatikan lingkungan strategis daerah, maka dapat dirumuskan isu strategis pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2019 sebagai berikut:

Infrastruktur mengacu pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, air, bangunan, dan fasilitas publik lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial. Infrastruktur pada dasarnya merupakan aset pemerintah yang dibangun dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat.

Saat ini masalah infrastruktur terutama jalan kabupaten menjadi agenda penting untuk dibenahi, karena merupakan penentu utama keberlangsungan kegiatan pembangunan, diantaranya untuk mencapai target pembangunan ekonomi secara kualitatif maupun kuantitatif. Prasarana jalan memberikan peran sebanyak-banyaknya dalam kelancaran distribusi, pelayanan jasa angkutan manusia, barang dan jasa yang dipastikan dapat menunjang perekonomian.

Dalam jangka pendek pembangunan infrastruktur akan menciptakan lapangan kerja sektor konstruksi. Dalam jangka menengah dan panjang akan mendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas sektor-sektor ekonomi terkait. Pembangunan infrastruktur antara lain dapat meningkatkan efisiensi ekonomi, menghemat penggunaan energi, memperlancar arus barang, membuka berbagai kemungkinan investasi, yang

Pada Akhirnya akan meningkatkan produksi barang dan jasa diberbagai sektor yang pada ujungnya memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur dapat dianggap sebagai strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pengentasan

kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, peningkatan mobilitas barang dan jasa, serta dapat mengurangi biaya investor dalam dan luar negeri.

Adapun analisis lingkungan strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

2.3.1. Urusan Perumahan

1. Masih banyaknya kawasan permukiman kumuh di beberapa lokasi khususnya di kawasan perkotaan di Kabupaten Pemalang. Hingga tahun 2020, kawasan kumuh di Kabupaten Pemalang masih berkisar 3%.
2. Rumah tidak layak huni di Kabupaten Pemalang masih cukup besar. Berdasarkan data BBDT, jumlah RTLH di Kabupaten Pemalang mencapai 70.000 RTLH.

a. Lingkungan Internal

Kekuatan

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM); Untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang mempunyai sumber daya manusia sebanyak 56 pegawai. Secara kuantitas dan kualitas jumlah pegawai di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang cukup potensial baik dari kepangkatan/golongan, pendidikan maupun dari bidang keahlian.

Tabel 2.3.1 menggambarkan pegawai di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang berdasarkan eselon.

Tabel 2.3-1Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jumlah (Orang)
1	Eselon IIb.	1
2	Eselon IIIa.	1
3	Eselon IIIb.	2
4	Eselon IVa	7
5	Eselon IVb	1
6	Staf	37
	Jumlah	49

Sumber Data :Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang 2018

Sarana dan Prasarana (Peralatan dan Inventaris Kantor);Fasilitas dan peralatan yang dimiliki oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dijelaskan pada table 2.3.2

Tabel 2.3.2Fasilitas dan Peralatan

No	Jenis Fasilitas dan Peralatan	Jumlah
1	Bangunan Gedung	3 buah
2	Peralatan	
	a. Alat – alat besar	-
	b. Alat – alat bengkel	-
	c. Alat – alat angkut	10 BUAH
3	Lain – Lain	
	a. Alat rumah tangga& Kantor	150 buah
	b. Alat studio& Komunikasi	6 buah
	c. Barang- barang kesenian	-

Kelemahan

1. Ketidak merataannya pembagian SDM antara Sekretariat dan Bidang -bidang serta masih kurangnya pelaksana yang potensial dibidangnya untuk terpenuhinya sarana dan prasarana infrastruktur menyebabkan terlambatnya proses perencanaan, pelaksanaan , pengawasan dan pelaporannya.
2. Anggaran yang tersedia belum cukup membiayai program/kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD);

b. Lingkungan Eksternal

Kekuatan

- 1) Kualitas yang membaik Konsultan dan Kontraktor

Di kabupaten pemalang terdapat kurang lebih 478 kontraktor yang telah memenuhi persyaratan dalam mengikuti proses pengadaan barang dan jasa di kabupaten, Banyak diantaranya yang telah mempunyai kualifikasi K1, dan K2, dari masing masing kontraktor juga telah mempunyai Sertifikat keahlian sesuai dengan bidangnya masing masing.

- 2) Koordinasi yang baik antara PD, Kementrian dan Lembaga Nasionallainnya yang terkait;
- 3) Komitmen legislatif dalam mendukung penganggaran berbasis kinerja;

Kelemahan

Adanya aturan baru tentang Pembagian Kewenangan Daerah dan Provinsi serta Undang -Undang Baru tentang Desa dan kurang sigapnya Pemerintah daerah dalam pelaksanaan Undang-undang, Permen dan perda Provinsi menyebabkan banyak pekerjaan tidak dilaksanakan.

Ancaman

Bencana Alam (longsor, banjir, cuaca ekstrim dan lain-lain).

Dari kondisi tersebut diatas baik secara eksternal maupun internal maka strategi yang ditempuh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah :

Mengadakan/mengikuti pelatihan/kursus tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan kegiatan;

Menganalisa bersama kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan;

Mengantisipasi kemungkinan kondisi alam kedalam konsep perencanaan teknis;

Menggunakan jasa pihak ketiga (tenaga ahli) dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan teknis;

Mencari dan melibatkan pihak investor dalam pelaksanaan program/kegiatan;

Pelibatan masyarakat dalam mensukseskan pelaksanaan program/kegiatan;

Mencari dan mendapatkan solusi yang tepat dalam mengantisipasi kondisi alam.

Adapun strategi tersebut didukung dengan Kebijakan- kebijakan teknis yang diambil Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang Jaya meliputi :

Meningkatkan kualitas pelaksana dan pengawas teknis pembangunan daerah.

Mendorong efektifitas dan efisiensi pelaksanaan teknis pembangunan daerah.

Meningkatkan keahlian dan profesionalisme aparatur perencana dan pelaksana teknis pembangunan daerah.

Meningkatkan peran serta masyarakat dan semua pihak terkait dalam perencanaan pembangunan daerah.

2.4.RIVIEW RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD tahun anggaran 2021 sebesar Rp.79.790.000.000,00 terurai dalam 8 program dan 63 kegiatan Rencana kerja harusnya bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik,dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD),Rencana Strategis OPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja OPD. Dan untuk itu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang tetap berjalan sesuai dengan jalur yang ada sesuai petunjuk teknis dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimum yang disyaratkan. Untuk lebih jelas tentang Rancangan Awal RKPD dan Hasil Analisis Kebutuhannya dapat terlihat pada Tabel 2.4.1: Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021

Tabel 2,4,1
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pematang Tahun 2021
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL				80.565.000.000,00				0,00
1	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar								
1,4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				79.790.000.000,00				0,00
1.4.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan		0.00 bulan	17.835.000.000,00			0.00 bulan	0,00
1.4.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	- Persentase tersedianya jasa surat menyurat		100.00 surat	15.000.000,00			0.00 surat	0,00
1.4.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Prosentase tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik		100.00 %	17.000.000.000,00			0.00 %	0,00
1.4.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	persentase terlaksananya perizinan kendaraan dinas/operasional		100	30.000.000,00			0	0,00
1.4.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	persentase terlaksananya jasa administrasi keuangan		100	150.000.000,00			0	0,00
1.4.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	persentase tersedianya jasa kebersihan kantor		100	90.000.000,00			0	0,00

1.4.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	persentase tersedianya alat tulis kantor		100	60.000.000,00			0	0,00
1.4.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggadaan		100	60.000.000,00			0	0,00
Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.4.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	presentase tersedianya komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor.		100	25.000.000,00			0	0,00
1.4.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		100	50.000.000,00			0	0,00
1.4.1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	persentase tersedianya peralatan rumah tangga		100	35.000.000,00			0	0,00
1.4.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		100	20.000.000,00			0	0,00
1.4.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	persentase tersedianya makanan dan minuman		100	70.000.000,00			0	0,00
1.4.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	presentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah		100	200.000.000,00			0	0,00
1.4.1.19	Penyediaan Jasa Keamanan	persentase tersedianya jasa keamanan		100	30.000.000,00			0	0,00
1.4.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan		0	970.000.000,00			0	0,00
1.4.2.3	Pembangunan gedung kantor	persentase terlaksananya pembangunan gedung		100	100.000.000,00			0	0,00
1.4.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	persentase pengadaan kendaraan dinas roda 2		100	250.000.000,00			0	0,00

1.4.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	terlaksananya pengadaan brankas dan AC		100	50.000.000,00			0	0,00
1.4.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	terlaksananya pengadaan sound system ruangan dan proyektor + attachment		100	50.000.000,00			0	0,00
1.4.2.10	Pengadaan mebeleur	terlaksananya pengadaan meubeleur		100	50.000.000,00			0	0,00
1.4.2.11	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	terlaksananya pengadaan komputer dan perlengkapannya		100	50.000.000,00			0	0,00
1.4.2.13	Pengadaan peralatan kerja	terlaksananya pengadaan peralatan kerja		100	50.000.000,00			0	0,00
1.4.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		100	100.000.000,00			0	0,00
Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.4.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		100	100.000.000,00			0	0,00
1.4.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		100	20.000.000,00			0	0,00
1.4.2.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala meubeler		100	10.000.000,00			0	0,00
1.4.2.30	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya		100	40.000.000,00			0	0,00
1.4.2.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		100	100.000.000,00			0	0,00
1.4.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDM Aparatur yang Memiliki Kompetensi		0	150.000.000,00			0	0,00
1.4.5.4	Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD	terlaksananya bimbingan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD		100	150.000.000,00			0	0,00

1.4.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen capaian kineja dan keuangan yang tersedia		0	210.000.000,00			0	0,00
1.4.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	persentase tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		100	30.000.000,00			0	0,00
1.4.6.2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	persentase tersusunnya pelaporan keuangan semesteran		100	25.000.000,00			0	0,00
1.4.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	persentase tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran dan laporan inventarisasi BMD		100	25.000.000,00			0	0,00
1.4.6.4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	persentase tersusunnya laporan keuangan akhir tahun		100	30.000.000,00			0	0,00
1.4.6.9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	persentase tersusunnya laporan perkembangan kegiatan		100	100.000.000,00			0	0,00
1.4.9	Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	Jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersedia		0	250.000.000,00			0	0,00
1.4.9.1	Penyusunan data base perencanaan SKPD	persentase penyusunan database perencanaan		100	100.000.000,00			0	0,00
Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.4.9.2	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran		100	150.000.000,00			0	0,00
1.4.15	Program Pengembangan Perumahan	- Persentase Kawasan Kumuh		0.00 %	59.685.000.000,00			0.00 %	0,00
1.4.15.1	Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan	tersedianya peraturan Per Undang-Undangn tentang perumahan		100	90.000.000,00			0	0,00
1.4.15.3	Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	terlaksananya koordinasi pengembangan perumahan		100	70.000.000,00			0	0,00
1.4.15.4	Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan	terlaksananya sosialisasi peraturan per undang-undangan tentang perumahan		100	75.000.000,00			0	0,00

1.4.15.5	Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha	terlaksananya rapat-rapat koordinasi pembangunan perumahan		100	50.000.000,00			0	0,00
1.4.15.6	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	terlaksananya pengadaan material RTLH, Kegiatan BSPS, Pendampingan Banprov		100	10.000.000.000,00			0	0,00
1.4.15.7	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	terlaksananya pengaspalan jalan kelurahan di kabupaten pemalang		100	5.000.000.000,00			0	0,00
1.4.15.8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaporan kegiatan		100	50.000.000,00			0	0,00
1.4.15.9	Pembangunan prasarana dan sarana utilitas umum (PSU)	persentase terbangunnya prasarana dan sarana utilitas umum (PSU)		90	40.000.000.000,00			0	0,00
1.4.15.10	Pemeliharaan prasarana dan sarana utilitas umum	terlaksananya pemeliharaan prasarana dan sarana utilitas umum, PJU dan Rusunawa		100	4.000.000.000,00			0	0,00
1.4.15.11	Penyusunan Database Perumahan	tersusunnya data base perumahan		100	50.000.000,00			0	0,00
1.4.15.13	Fasilitasi dan Verifikasi Proses Sertifikasi Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Sertifikasi kepemilikan bangunan gedung		100	50.000.000,00			0	0,00
1.4.15.14	Fasilitasi dan Verifikasi Pengajuan Rekomendasi Teknis IMB	tersosialisasinya rekomendasi teknis IMB		100	50.000.000,00			0	0,00
1.4.15.16	Fasilitasi Penanganan Sengketa Perumahan	terlaksananya fasilitasi permasalahan sengketa rumah		100	50.000.000,00			0	0,00
1.4.15.18	Penyusunan Database Kawasan Permukiman dan Prasarana dan Sarana Umum	terlaksananya kegiatan penyusunan data base kawasan permukiman dan prasarana dan sarana umum		100	50.000.000,00			0	0,00
Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.4.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	- Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni		0	690.000.000,00			0	0,00
1.4.16.1	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan	Terlaksananya kegiatan koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan		100	200.000.000,00			0	0,00

1.4.16.3	Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan	Terselenggaranya kegiatan penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan		100	50.000.000,00			0	0,00
1.4.16.4	Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan	Terlaksananya kegiatan pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan		100	100.000.000,00			0	0,00
1.4.16.6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring dan valuasi		100	50.000.000,00			0	0,00
1.4.16.7	Rekonstruksi dan Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam	Terlaksananya rekonstruksi dan rehabilitasi rumah akibat bencana		100	100.000.000,00			0	0,00
1.4.16.8	Fasilitasi Penyediaan Perumahan dan Permukiman Bagi Masyarakat Berkemampuan Rendah (MBR)	terlksanany fasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)		100	50.000.000,00			0	0,00
1.4.16.9	Pembinaan dan Bimbingan Teknis Penyediaan dan Pengendalian Kawasan Permukiman	Terlaksananya pembinaan dan bimbingan teknis penyediaan dan pengendalian kawasan kumuh		100	50.000.000,00			0	0,00
1.4.16.11	Fasilitasi Penyediaan dan Pengembangan Kawasan Siap Bangun (KASIBA)	Terlaksananya fasilitasi penyediaan dan pengembangan kawasan siap bangun (KASIBA)		100	50.000.000,00			0	0,00
2	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar								
2,4	Pertanahan				775.000.000,00				0,00
2.4.15	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Prosentase terselesaikanya konflik-konflik pertanahan		0	775.000.000,00			0	0,00
2.4.15.1	Fasilitasi penyelesaian Permasalahan di bidang pertanahan	Terlaksananya fasilitasi penyelesaian permasalahan di bidang pertanahan		100	500.000.000,00			0	0,00
2.4.15.2	Rapat koordinasi di bidang pertanahan	Terlaksananya rapat koorsinasi di bidang pertanahan		100	125.000.000,00			0	0,00
Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

2.4.15.3	Fasilitasi Pengadaan Tanah	Terlaksananya sosialisasi aturan perundangan terkait pengadaan tanah kepada OPD dan BUMD		100	100.000.000,00			0	0,00
2.4.15.4	Penyusunan Data Base Pertanahan	Tersusunan data base tanah milik Pemkab Pematang		100	50.000.000,00			0	0,00

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA 2020 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN PEMALANG

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah

Tinjauan kebijakan nasional mendasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2005-2025. Pada periode 2010-2014 RPJMN merupakan kelanjutan dari RPJMN I dan II dengan penekanan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing perekonomian.

Dukungan peningkatan daya saing perekonomian terkait bidang infrastruktur nasional adalah pengembangan jaringan transportasi, penerapan inovasi teknologi yang memanfaatkan energi terbarukan, pengembangan sumber daya air dan pengembangan perumahan dan permukiman sejalan dengan pengembangan secara berkelanjutan industri kelautan, pengelolaan energi alam dan sumber daya mineral.

Pembangunan berkelanjutan diwujudkan dengan program rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dengan tujuan untuk memelihara sekaligus memanfaatkan kekayaan hayati dan sumber daya alam khas wilayah tropis dalam kerangka peningkatan daya saing bangsa dan sebagai modal pembangunan ke depan. Disamping pemantapan kelembagaan

dan kemampuan mitigasi bencana diantara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Kebijakan tersebut didukung dengan perencanaan tata ruang yang semakin baik dan menyatukannya terhadap dokumen perencanaan pembangunan serta diikuti dengan penegakan peraturan-peraturan untuk pengendaliannya.

Disamping kebijakan nasional pembangunan, perlu kiranya memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang telah ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi capaian terhadap RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2020 dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Tujuh prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah adalah Menurunkan angka kemiskinan, Memantapkan ketahanan pangan, Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Meningkatkan potensi dan daya saing daerah yang didukung peningkatan infrastruktur, Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup serta pengurangan resiko bencana, Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan Memantapkan demokratisasi dan konduktivitas wilayah.

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kedua kebijakan tersebut, yang secara umum menitikberatkan pada daya tahan perekonomian dan kesejahteraan rakyat tujuan dan sasaran Rencana

Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ditetapkan, disamping mengutamakan hasil evaluasi pencapaian target RPJMD Kabupaten Pemalang 2016-2021.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Tahun 2020 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi factor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan pembangunan infrastruktur daerah, dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis yang berorientasi untuk menghasilkan infrastruktur daerah yang berkualitas.

Visi : **“TERWUJUDNYA PEMALANG HEBAT YANG BERDAULAT, BERJATIDIRI, MANDIRI DAN SEJAHTERA”**

Misi :

Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2020, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021 untuk program dan kegiatan di tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Rumusan tujuan sasaran berdasarkan misi yang telah diurutkan adalah sebagai berikut:

VISI : Terwujudnya Pemalang Hebat Yang Berdaulat, Berjatidiri, Mandiri Dan Sejahtera			
MISI 4 : Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan pemerintah	Nilai Sakip	a. Meningkatnya nilai Sakip	Meningkatnya kualitas perencanaan penganggaran pembangunan daerah serta pelaporan kinerja pembangunan daerah
2. Meningkatkan kualitas Perumahan	1. Persentase RTLH 2. Persentase Rumah Layak huni	b. Kualitas perumahan dan sarana prasarananya	Peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang berbasis kewilayahan
3. Kualitas Kawasan Perumahan	1. Persentase kawasan kumuh 2. Persentase Luasan RTH Publik	Meningkatnya kualitas kawasan perumahan	Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Rencana Kerja dan Pendanaan ini merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan

Program dan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang tahun 2021 seperti dalam lampiran tabel 3.3.1

Tabel. 3.3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Dinas Perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Pematang

Kode Urusan	Kode Program/ Kegiatan	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan		Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Target	Organisasi	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3		4	5	6	7
		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				DISPERKIM	81.365.000.000
1	4	<u>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</u>				DISPERKIM	80.590.000.000
1	4	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan	12 bulan	DISPERKIM	16.835.000.000
1	4	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim selama 1 tahun	DISPERKIM	15.000.000
1	4	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Kebutuhan jasa komunikasi air, listrik, penerangan jalan umum selama 1 tahun	DISPERKIM	16.000.000.000
1	4	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/Operasional yang terpelihara	DISPERKIM	30.000.000
1	4	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah administrasi keuangan yang disusun selama 1 tahun	DISPERKIM	150.000.000
1	4	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah gedung yang terpelihara kebersihannya	DISPERKIM	90.000.000
1	4	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah persediaan ATK selama 1 tahun	DISPERKIM	60.000.000
1	4	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak, Jumlah dokumen yang digandakan	DISPERKIM	60.000.000
1	4	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik penerangan bangunan	DISPERKIM	25.000.000

1	4	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	kamera ,gps, handycam,proyektor, drone,audio sistem	DISPERKIM	50.000.000
1	4	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan yang tersedia	12 bulan	DISPERKIM	35.000.000
1	4	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar dan majalah, jumlah buku	12 bulan, 10 buku	DISPERKIM	20.000.000
1	4	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	5000 dus	DISPERKIM	70.000.000
1	4	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	200 kali	DISPERKIM	200.000.000
1	4	1	19	Penyediaan Jasa Keamanan	Jumlah gedung yang terjaga keamanannya	1 kantor	DISPERKIM	30.000.000
1	4	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan	12 bulan	DISPERKIM	2.770.000.000
1	4	2	3	Pembangunan gedung kantor	Terlaksananya pembangunan Gedung Kantor	1 Gedung	DISPERKIM	100.000.000
1	4	2	5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan dinas Roda Empat dan Roda Dua	mobil operasional , truk tangga,dum truk , motor roda 2	DISPERKIM	2.000.000.000
1	4	2	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	ac,brankas,dispenser	DISPERKIM	50.000.000
1	4	2	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor		DISPERKIM	50.000.000
1	4	2	10	Pengadaan mebeleur	terlaksananya pengadaan meubelair	meja,kursi,lemari	DISPERKIM	50.000.000
1	4	2	11	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	terlaksananya pengadaan komputer dan perlengkapannya	Tersedianya PC, Desktop, Notebook dan Printer	DISPERKIM	100.000.000

1	4	2	13	Pengadaan peralatan kerja	terlaksananya pengadaan peralatan kerja	Mesin potong rumput =5, Gergaji mesin = 3, hammer test	DISPERKIM	50.000.000
1	4	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung yang terpelihara	1 Gedung	DISPERKIM	100.000.000
1	4	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan Dinas Roda 4 yg terpelihara Jumlah kendaraan Dinas Roda 2 yg terpelihara Jumlah Pelumas yang tersedia Jumlah pertamax yg tersedia	DISPERKIM	100.000.000
1	4	2	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			DISPERKIM	20.000.000
1	4	2	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah meubeler yang terpelihara	3	DISPERKIM	10.000.000
1	4	2	30	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	Jumlah komputer dan printer yang terpelihara	50 unit	DISPERKIM	40.000.000
1	4	2	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1 gedung	DISPERKIM	100.000.000
1	4	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase ASN yang mengikuti diklat terhadap jumlah ASN	3.63%	DISPERKIM	150.000.000
1	4	5	4	Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD	Jumlah peserta	50 orang	DISPERKIM	150.000.000
1	4	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia	60%	DISPERKIM	210.000.000
1	4	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yg disusun	2 Laporan	DISPERKIM	30.000.000

1	4	6	2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah pelaporan keuangan yang disusun	2 Laporan	DISPERKIM	25.000.000
1	4	6	3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah Laporan Prognosis realisasi anggaran semester I dan II Jumlah laporan inventarisasi barang milik daerah	2 Laporan 2 Laporan	DISPERKIM	25.000.000
1	4	6	4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersedia	5 laporan	DISPERKIM	30.000.000
1	4	6	9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan 12 bulan		DISPERKIM	100.000.000
1	4	9		Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	Prosentase jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersedia	60%	DISPERKIM	225.000.000
1	4	9	1	Penyusunan data base perencanaan SKPD	data base perencanaan	2 paket	DISPERKIM	100.000.000
1	4	9	2	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	5 Laporan	DISPERKIM	125.000.000
1	4	15		Program Pengembangan Perumahan	a. Persentase rumah tinggal bersanitasi,	a. 75 %,	DISPERKIM	59.685.000.000
					b. Persentase kawasan kumuh	b. 3.5 %		
1	4	15	1	Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan	tersedianya Peraturan Perundang-undangan tentang Perumahan		DISPERKIM	90.000.000
1	4	15	3	Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	Terlaksananya koordinasi pengembangan perumahan		DISPERKIM	70.000.000
1	4	15	4	Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan	terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang perumahan	90%	DISPERKIM	75.000.000
1	4	15	5	Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha	terlaksananya Rapat - rapat koordinasi pembangunan perumahan	90%	DISPERKIM	50.000.000
1	4	15	6	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Terlaksananya pengadaan material RTLH	300 rumah	DISPERKIM	10.000.000.000
1	4	15	7	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Terlaksananya pengaspalan jalan lingkungan di kelurahan, terlaksananya pembangunan drainase kelurahan	28 paket, 28 paket	DISPERKIM	5.000.000.000

1	4	15	8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaporan kegiatan	90%	DISPERKIM	50.000.000
1	4	15	9	Pembangunan prasarana dan sarana utilitas umum (PSU)	Pembangunan RTH , Trotoar , boulevard dan LPJU kabupaten Pemalang	17 Paket	DISPERKIM	40.000.000.000
1	4	15	10	Pemeliharaan prasarana dan sarana utilitas umum	Pemeliharaan trotoar, Pemeliharaan RTH, Pemeliharaan LPJU Kabupaten Pemalang	13 paket	DISPERKIM	4.000.000.000
1	4	15	11	Penyusunan database perumahan			DISPERKIM	50.000.000
1	4	15	13	Fasilitasi dan verifikasi proses sertifikasi kepemilikan bangunan gedung (SKBG)			DISPERKIM	50.000.000
1	4	15	14	Fasilitasi dan verifikasi pengajuan rekomendasi teknis IMB			DISPERKIM	50.000.000
1	4	15	16	Fasilitasi penanganan sengketa perumahan			DISPERKIM	50.000.000
1	4	15	17	Perencanaan pembangunan/pemeliharaan prasarana dan sarana umum			DISPERKIM	100.000.000
1	4	15	18	Penyusunan database kawasan permukiman dan prasarana dan sarana umum			DISPERKIM	50.000.000
1	4	16		Program Lingkungan Sehat Perumahan	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	95%	DISPERKIM	690.000.000
1	4	16	1	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan			DISPERKIM	200.000.000
1	4	16	3	Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan	Jumlah kegiatan penyuluhan dan pengawasan lingkungan sehat perumahan	5 Kegiatan	DISPERKIM	50.000.000
1	4	16	4	Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan	Jumlah kegiatan pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan	5 Kegiatan	DISPERKIM	100.000.000
1	4	16	6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			DISPERKIM	50.000.000
1	4	16	7	Rekonstruksi dan rehabilitasi rumah akibat bencana alam			DISPERKIM	100.000.000
1	4	16	8	Fasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berkemampuan rendah (MBR)			DISPERKIM	50.000.000

1	4	16	9	Pembinaan dan bimbingan teknis penyediaan dan pengendalian kawasan permukiman	presentasi kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis penyediaan, pengendalian kawasan permukiman	10%	DISPERKIM	50.000.000
1	4	16	10	Fasilitasi dan verifikasi pengajuan perancangan dan perencanaan kawasan permukiman			DISPERKIM	50.000.000
1	4	16	11	Fasilitasi penyediaan dan pengembangan kawasan siap bangun (KASIBA)	Jumlah penyediaan dan pengembangan kawasan siap bangun	5 Kegiatan	DISPERKIM	50.000.000
1	4	16	12	Pencegahan dan penanggulangan rumah kumuh dan permukiman kumuh	Presentasi kegiatan pencegahan dan penanggulangan rumah kumuh dan permukiman kumuh	10%	DISPERKIM	40.000.000
2				Urusan wajib Bukan Pelayanan Dasar				775.000.000
2	4			Pertanahan				775.000.000
2	4	15		Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Prosentase terselesaikannya konflik- konflik pertanahan		DISPERKIM	775.000.000
2	4	15	1	Fasilitasi penyelesaian permasalahan di bidang pertanahan			DISPERKIM	500.000.000
2	4	15	2	Rapat koordinasi di bidang pertanahan			DISPERKIM	125.000.000
2	4	15	3	Fasilitasi Pengadaan Tanah			DISPERKIM	100.000.000
2	4	15	4	Penyusunan Data Base Pertanahan			DISPERKIM	50.000.000
JUMLAH								81.365.000.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2021 selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2021 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Renja memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang 2016-2021. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2021 tetap berpegang pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

Namun demikian salah satu kendala penting dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang berdasarkan tugas dan fungsinya adalah kurangnya anggaran yang dialokasikan. Hal ini terlihat dari usulan kegiatan yang begitu banyak tetapi yang dialokasikan setiap tahunnya hanya sedikit yang terakomodir.

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terbitnya permendagri No. 54 Tahun 2010, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Didalam penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang tahun 2021 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang. Hal ini dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri No.54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
2. Didalam penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2021 ,masih belum sempurna,terkait dengan terbitnya Permendagri No.54 tahun 2010 sedangkan pemahaman tentang aturan tata cara penyusunan masih berbeda-beda;
3. Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang tahun 2021 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten maupun APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur padahal selama ini anggaran yang disediakan untuk itu sangatlah terbatas;

2. Menerapkan system *reward andpunishment* terhadap seluruh staf dan mengaplikasikan pada pendistribusian pekerjaan secara merata;
3. Dalam Rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif didalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat;dalam pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Perubahan Renja DISPERKIM 2021 yang akan terwujud dalam Renja Perubahan Dinas Perumahan dan kawasan permukiman kabupaten Pemalang 2021.

Pemalang, 2020

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PEMALANG



Ir. MUGIYATNO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640528 198903 1 008